



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SESKA VONNY LANGITAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**
3. NHK : **1013355**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.435.000.000**

1. Tanah Seluas 106 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. Tanah Seluas 106 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 522 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA MANADO , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 372.500.000**

1. MOTOR, HONDA D1B02N26LZ A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA NF11CICM/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
4. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 20.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 10.000.000**



F. HARTA LAINNYA

Rp. 175.000.000

Sub Total

Rp. 4.012.500.000

III. HUTANG

Rp. 210.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.802.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.